

## WARISAN SEJARAH SEBAGAI TEATER MEMORI

Oleh : Hasti Tarekat

Direktur Eksekutif Badan Warisan Sumatra (BWS)

Dari sepuluh kota terbaik di Asia pada tahun 2000 versi Asiaweek, seluruhnya tengah bergiat menyelamatkan warisan sejarah mereka. Sayangnya tak ada satu pun diantaranya kota di Indonesia. Mereka adalah Fukuoka, Tokyo, Singapura, Osaka, Taipei, Hong Kong, Bandar Seri Begawan, Kuala Lumpur, George Town, Pusan dan Seoul. Menurut Asiaweek, di kota-kota yang paling layak huni tersebut tengah terjadi jalinan cinta dengan masa lalu yang sangat mesra. Para konservasionis sulit mempercayai bagaimana keadaan berubah dengan drastis. Dulu, orang yang ingin melestarikan warisan sejarah diejek sebagai sentimentalisme atau bahkan yang lebih buruk lagi didakwa sebagai penentang kemajuan. Preservasi di perkotaan sama sekali tidak masuk dalam agenda pembangunan pemerintahan dimanapun. Tidak ada anggaran untuk pekerjaan restorasi karena telah dihabiskan untuk pembangunan infrastruktur. Pada masa jaya usaha real estate, berbagai kawasan lama dibulldoser untuk pembangunan bangunan pencakar langit. Jalan layang membentang di sepanjang kota. Baru pada saat krisis ekonomi tahun 1990an pembangunan beton dan kaca yang membabi buta di Asia agak berkurang dan melambat. Kemiskinan juga menjadi berkah lain yang terselubung karena secara tidak langsung melindungi bangunan dan kawasan bersejarah, terutama di kota-kota kecil. Para konservasionis di kota-kota besar harus berjuang lebih keras menyelamatkan warisan sejarah mereka.

Tidak ketinggalan *Newsweek* pun menulis (17 Januari 2000) menulis tentang “*The New Face of Old Asia : From Beijing to Bandung, A Movement to Preserve Architectural Treasure*” (Wajah Baru Asia Lama : Dari Beijing sampai Bandung, Sebuah Gerakan untuk Melestarikan Warisan Arsitektural). Menurut artikel tersebut, sebuah minat baru sedang tumbuh di Asia. Jika pembangunan yang pesat pernah menjadi mantra, maka kini warisan dan identitas menjadi buah bibir.

Kesadaran terhadap pelestarian warisan sejarah memang sedang tumbuh di kalangan pelaksana pembangunan di negara-negara Asia. Sisi buruknya, banyak perencana kota melihat pelestarian warisan sejarah hanya sebagai alat untuk menarik wisatawan. Maka kawasan-kawasan lama pun diubah bagai panggung pertunjukan. Padahal alasan terbaik untuk konservasi adalah bagaimana menghidupkan kekayaan budaya di tengah-tengah

masyarakat. Kawasan lama, bagaimanapun juga adalah bagian dari identitas sebuah kota dan masyarakatnya.

Konservasi memang bukan soal sederhana. Keberhasilannya ditentukan oleh gabungan berbagai faktor yakni *regulasi*, *insentif finansial* dan *partisipasi masyarakat*. Singapura adalah salah satu negara di Asia yang paling dini menyadari pentingnya melestarikan warisan sejarah terutama di perkotaan. Pemerintah Singapura mengeluarkan anggaran yang relatif besar untuk meremajakan kawasan-kawasan lama. Tetapi usaha ini tidak sepenuhnya berhasil karena renovasi ala Singapura yang gemar mengecat ruko dengan warna-warni pastel dinilai terlalu steril, artifisial. Bukan hanya bangunan yang perlu diselamatkan tetapi juga masyarakat yang menghuni bangunan dan kawasan itu yang perlu mendapat perhatian.

Karena kota adalah sebuah sistem kehidupan maka peremajaan kawasan perlu mempertimbangkan faktor manusia. Misalnya saja harga properti yang tinggi di suatu kawasan lama atau biasanya di pusat kota cenderung akan menggusur para penduduk yang sudah bergenerasi-generasi tinggal di sana. Jika mereka pindah, berarti hilang pula suatu komunitas yang unik. Fenomena ini tengah terjadi di Penang yang sejak April 2000 memberlakukan peraturan pengawasan uang sewa oleh pemerintah. Karena uang sewa menjadi sangat tinggi, maka para penghuni pindah ke pinggir-pinggir kota yang relatif terjangkau, meninggalkan kawasan lama George Town yang biasanya ramai. Bangunan-bangunan lama memang masih ada tetapi tanpa penghuni maka kawasan itu pun kehilangan nafas kehidupannya yang khas.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Tiga kombinasi (*regulasi*, *insentif finansial* dan *partisipasi masyarakat*) yang diperlukan untuk keberhasilan suatu gerakan pelestarian warisan sejarah belum benar-benar terwujud. Regulasi sudah ada tetapi tidak dilaksanakan secara konsisten. Insentif finansial tidak terjangkau oleh anggaran pemerintah. Partisipasi masyarakat berupa *heritage society* baru saja dimulai pertengahan 1980an dan berjuang di segala lini untuk bertahan hidup. Padahal sementara itu pembangunan yang pro beton dan kaca berjalan gencar dan pembicaraan mengenai perlunya pelestarian identitas kota dianggap buang-buang waktu.

Ambil contoh Bandung sebagai kota pertama di Indonesia yang mempunyai *heritage society* pada tahun 1986 bernama Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung. Setelah berjuang sekian lama, kawasan-kawasan lama di kota Bandung sangat sulit menunjukkan kecantikannya kembali karena partisipasi masyarakat itu tidak didukung oleh konsistensi pelaksanaan regulasi dan insentif finansial. Kawasan Braga yang dibanggakan Bandung berusaha dihidupkan kembali tetapi keberhasilannya bersifat parsial. Bangunan-bangunan *art deco* yang masuk dalam ranking ketiga di dunia di kawasan Braga (setelah Miami di Amerika Serikat dan Napier di Selandia Baru) merunduk sedih diselimuti debu dan dimakan usia.

Kasus yang sama menimpa kota-kota lain di Indonesia diantaranya Semarang, Yogyakarta, Jakarta, Padang, Bengkulu, Gunung Sitoli dan Medan. Di kota-kota ini terdapat kelompok masyarakat yang aktif melestarikan warisan sejarah namun pencapaian keberhasilannya sangat lambat karena tidak ada kombinasi ketiga faktor di atas. Bahkan yang lebih buruk, bukan hanya pelaksanaan regulasi tidak konsisten dan tidak adanya insentif finansial, ditambah lagi dengan orientasi pembangunan yang memang tidak meng-agenda-kan pelestarian warisan sejarah. Kalaupun ada masih pada tahap percobaan dan dijalankan dengan setengah hati. Menilainya sangat mudah, lihat saja hasilnya yang tidak kunjung terwujud dalam kenyataan, misalnya peremajaan kawasan Jakarta lama, kawasan Padang lama atau kawasan Kesawan di Medan. Semua pihak sepakat terhadap nilai historis berbagai kawasan lama tersebut tetapi mengapa masih ada bangunan yang langsung dihancurkan atau ditelantarkan untuk kemudian dihancurkan. Jika *built heritage* atau bangunan-bangunan lama di suatu kawasan sudah dihancurkan atau ditelantarkan, bisa dipastikan para penghuninya pun ikut terlibas : pindah ke kawasan lain atau kehilangan semangat memelihara kawasannya. Untuk apa dipelihara? Bisnis tidak hidup, tetangga sudah berganti dengan sekawan walet, lingkungan menjadi jorok, siapa peduli? Maka mati pulalah *living heritage*-nya.

### Identitas Kultural dan Perkotaan

Pada saat perekonomian Asia diterjang badai pada pertengahan tahun 1997, kota-kota di Asia dipenuhi oleh mal, plasa, kondominium dan hotel-hotel pencakar langit. Aliran investasi asing dan pasar modal menghasilkan kota-kota besar yang nyaris seragam dengan bangunan tinggi bergaya internasional, melibas gaya lokal dan menipiskan identitas

dinamis setempat tanpa terasa. Bangunan tanpa konteks, tanpa lansekap, tanpa skala dan tanpa sejarah - atau setidaknya tidak menyuarakan apapun sebagai referensi utama (Lim, 1998). Keadaan ini tidak terkecuali terjadi juga di kota-kota besar di Indonesia. Kota-kota dibangun dengan landasan yang disebut sindrom Wall Street dan Fifth Avenue, dua kawasan bisnis utama di New York yang menjadi simbol modernisme dan sukses a la Amerika.

Akibat dari pembangunan fisik seperti itu, kota-kota di Indonesia banyak kehilangan bangunan bersejarah dan bangunan berciri khas lokal yang sesungguhnya sangat penting sebagai sumber identitas kota dan warganya. Bangunan khas lokal pada tingkat tertentu selalu memberi kontribusi sejarah pada suatu kota. Mengapa bangunan-bangunan ini sesungguhnya penting untuk dipertahankan? Karena bangunan merupakan salah satu sumber yang paling baik untuk menginterpretasikan pengalaman di masa lalu. Bangunan membingkai kehidupan banyak orang selama beberapa generasi, menjadi sumber memori kolektif atau sosial yang berhubungan dengan sejarah keluarga, lingkungan dan kelompok etnis (Hayden, 1997). Bangunan-bangunan tersebut tidak selalu harus berupa tengeran (landmark) sebuah kota, tetapi bisa saja gedung pertemuan, sekolah, rumah tinggal dan semacamnya yang mempunyai kekuatan untuk membangkitkan memori sosial visual. Jika sebuah bangunan semacam itu dihancurkan, memori kolektif yang penting bagi banyak orang ikut dihapuskan. Identitas publik yang bersumber dari sejarah milik bersama pun hilang. Jika sumber-sumber memori kolektif dihancurkan, masyarakat akan kehilangan jati dirinya, tidak ada perekat emosi dengan lingkungan sekitarnya dan lambat laun menciptakan masyarakat yang rapuh tanpa tradisi dan sejarah.

Sampai pada tingkat tertentu, situasi seperti itulah yang membuat kota-kota di Indonesia saat ini relatif rentan terhadap gejolak berbagai persoalan. Secara umum kita merasa percaya diri sebagai bangsa yang kaya akan tradisi, budaya, adat istiadat dan nilai-nilai lokal. Namun kita kerap kali terlengah bahwa seluruh sumber kepercayaan diri tersebut harus dipelihara, dibina, diteruskan pada generasi yang lebih muda, diberi tempat dalam keseharian, dimunculkan secara fisik maupun nonfisik, dilestarikan dan dirawat. Begitu lamanya kita membanggakan pembangunan fisik yang artifisial karena tidak berorientasi pada manusia -dengan nilai, tradisi dan kelokalannya- dan tiba-tiba ketika balon ekonomi itu meletus kita pun sadar bahwa jiwa kita begitu kering di tengah kesumpekan jalan dan beton-beton tidak bersahabat. Kota kita morat-marit, kota kita tidak mengakomodasi

kebutuhan dasar warganya untuk berbudaya, kota menjadi pusat kerusuhan karena tidak ada lagi sumber-sumber memori kolektif yang mempersatukan warganya, kota dibangun dengan mahal dan warga tidak membanggakannya.

Berbicara tentang tradisi, budaya dan nilai-nilai dalam konteks pembangunan kota sungguh menantang semua pihak yang terlibat dalam pembicaraan itu. Selama sesuatu hal - dipersepsikan- tidak berkaitan dengan keuntungan ekonomi maka porsinya adalah kesenggangan, paruh waktu, apresiasi basa-basi, bahkan bagi sebagian orang menjemukan. Kota membutuhkan jalan, jembatan, gedung, air, listrik, tetapi budaya? Maka para intelektual budaya pun gemas dan menunjukkan dengan fakta statistik betapa besarnya kontribusi budaya pada perekonomian kota dan karena itu berhak mendapat perhatian dan prioritas seperti bidang lain. Pada tahun 1992 aspek budaya menyumbang 2,3 milyar dollar Amerika terhadap kegiatan ekonomi di kota New York . Kemudian kisah sukses kota Bilbao di Spanyol yang kaya ragam budayanya bukan saja mencengangkan para pecinta budaya tetapi juga para perencana ekonomi. Jika dikelola dengan baik, budaya bukan saja memperkuat akar masyarakat lokal tetapi juga merangsang datangnya keuntungan finansial. Maka ditinjau dari sudut apapun aspek budaya terlalu riskan untuk ditinggalkan dan dipandang remeh oleh para pelaksana pembangunan.

Dengan pertimbangan seperti di atas maka kesadaran mengenai budaya khususnya pelestarian warisan budaya semakin meningkat di negara-negara maju. Toleransi terhadap keragaman budaya menghidupkan kembali warisan masyarakat minoritas lokal di negara yang luas seperti Amerika Serikat maupun di negara yang kecil seperti Singapura. Kita ambil contoh bagaimana Singapura mengambil strategi menguatkan identitas nasionalnya melalui pembangunan infrastruktur budaya. Singapura adalah masyarakat yang multi ras dan multi agama terdiri dari 76% Cina, 15% Melayu, 7% India dan 2% Eurasia dan Kaukasia. Sebagai negara yang miskin dan terpecah-pecah pada tahun 1950an dan awal 1960an Singapura sering mengalami kerusuhan ras dan politis. Strategi yang ditempuh untuk mengatasi keadaan tersebut adalah menggemakan semangat nasionalisme melalui aspek kebudayaan. Berbagai kebijakan dan tindakan dilakukan untuk memelihara integrasi yang berkelanjutan dari populasi yang beragam. Hal ini termasuk mendorong tingkat pendidikan semua kelompok etnis, meningkatkan pendapatan dan mempromosikan kepemilikan rumah secara penuh. Hasilnya tercermin melalui statistik : antara 1980 dan 1990 jumlah pelajar sekolah menengah naik dari 12% menjadi 25%, dan lulusan perguruan

tinggi dari 3% menjadi 4%. Pendapatan perkapita dengan sendirinya ikut meningkat. Tahun 1970 adalah US\$2.825; tahun 1998 mencapai US\$39.000, menjadikan pendapatan perkapita Singapura salahsatu yang tertinggi di dunia. Tahun 1998 sekitar 87% dari total populasi tinggal di apartemen yang dibangun oleh *the Housing and Development Board* dan lebih dari 90% adalah memiliki rumah tinggal pribadi. Tingkat kepemilikan rumah yang tinggi membuat masyarakat Singapura menjadi tuan rumah di negara yang masih muda itu sekaligus memperkuat konsep kebangsaan.

Strategi lainnya untuk menciptakan integrasi sosial adalah meningkatkan identitas nasional melalui kebijakan-kebijakan dalam bidang kebudayaan. Perdana Menteri Singapura Goh Chok Tong menyatakan, warisan dan budaya menyatukan orang-orang, menjadikan mereka sebuah masyarakat yang unik dan memberi kekuatan moral.' Maka di Singapura terjadi perubahan yang besar dan mencolok dalam hal kegiatan kebudayaan yang dirancang untuk melindungi warisan budaya dan sejarah, monumen arsitektural dan kawasan-kawasan bersejarah. Kemudian isu-isu sensitif termasuk bahasa, agama dan festival-festival ditangani secara seksama. Bahasa resminya ada 4 yakni Inggris, Cina, Melayu dan Tamil. Sedangkan untuk agama walaupun Singapura adalah negara sekuler namun setiap agama diakui keberadaannya dengan hari libur nasional yang setara. Untuk mempromosikan budaya, pemain utamanya adalah the National Arts Council, didukung oleh berbagai kelompok etnis, seniman dan kelompok seni, serta berbagai lembaga pemerintah. Tujuan jangka panjangnya adalah menciptakan Singapura sebagai kota kebudayaan yang terpandang di dunia. Pendekatan kuncinya adalah menghidupkan masyarakat budayawan dan yang mencintai budaya; pembangunan yang berkesinambungan dan tekun untuk memperkuat identitas budaya Singapura membangkitkan kebudayaan negara itu yang sangat kaya dan beragam sekaligus memadukan budaya Timur dan Barat. Pengalaman Singapura menunjukkan bahwa dengan sensitivitas dan tekad kuat, sangat mungkin untuk meningkatkan integrasi sosial yang berkelanjutan dalam waktu relatif singkat.

Pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman Singapura adalah menciptakan infrastruktur sosial untuk mendorong integrasi masyarakat dari berbagai etnis. Proses ini mempunyai 4 tujuan :

1. Menangani isu-isu sensitif secara seksama yang mungkin mengancam hubungan yang harmonis antar etnis dan agama.

2. Mengakui, menghargai dan memasyarakatkan keragaman budaya.
3. Menciptakan institusi-institusi untuk memenuhi kebutuhan dan minat berbagai kelompok etnis.
4. Memperkuat kesadaran tentang kesatuan sebagai bangsa di atas semua kelompok etnis.

Jika kita menganggap bahwa bagaimanapun pertimbangan ekonomi tetap menjadi prioritas dalam pemberdayaan budaya, kita bisa belajar bagaimana mengarahkan investasi berbasis budaya dibandingkan investasi semata-mata untuk keuntungan ekonomi. Seorang ahli bernama Klamer menyatakan bahwa investasi berbasis budaya memberi keuntungan ganda, yang pertama memberi keuntungan finansial dan yang kedua keuntungan kultural. Kota mempunyai tiga jenis nilai : ekonomi, sosial dan budaya. Dua yang pertama saling mengisi untuk menciptakan lapangan kerja dan pendapatan pada satu sisi, serta kualitas hidup pada sisi yang lain. Sementara nilai budaya berada dalam detak jantung kehidupan kota. Nilai budaya menyiratkan nilai intrinsik atau simbolis yang membuat sebuah kota menjadi inspiratif atau istimewa.

Selanjutnya Klamer menyarankan agar para pelaksana pembangunan tidak semata-mata bersandar pada retorika ekonomi yang tampaknya kokoh, praktis dan menguntungkan, tetapi dalam banyak kasus sebenarnya palsu karena gagal menghitung baik biaya riil maupun biaya sosial. Klamer menganggap bahwa ada sesuatu yang lebih penting dalam hidup. Semangat itulah yang mendasari berbagai masyarakat pada Abad Pertengahan untuk membangun katedral yang megah dengan pengorbanan ekonomi yang masih wajar. Argumentasi ini baru dapat dijalankan jika sektor usaha mempunyai kemurah-hatian dan idealisme. Sarannya berlaku untuk negara maju ataupun negara berkembang karena setiap tempat mempunyai kekayaan warisan dan budaya.

Konsep lain yang menarik dikemukakan oleh David Throsby seorang profesor ekonomi dari Macquarie University di Sydney. Ketika pertimbangan pasar menjadi pertimbangan utama bagaimana memanfaatkan sumberdaya yang ada, maka beliau menambahkan jenis modal keempat setelah modal fisik, modal manusia dan modal alamiah yakni modal budaya. Sebagaimana halnya modal alamiah, modal budaya mengangkat isu keberlanjutan dan kesetaraan intergenerasi - artinya, tanggung jawab generasi saat ini untuk mewariskan budaya setidak-tidaknya sebagaimana yang ada sekarang pada generasi yang akan datang.

Modal budaya, dirumuskan oleh Throsby, mencakup aset fisik dan non-fisik. Aset fisik berupa bentuk visual di tempat dan masyarakat tertentu, sedangkan aset non-fisik berupa gagasan, ekspresi, nilai dan tradisi yang mengikat orang satu sama lain dan pada masa lalu kolektif. Jika modal budaya ini tidak dimiliki maka akan membahayakan sistem budaya, dengan kerugian tambahan hilangnya kesejahteraan dan keluaran ekonomis.

Contoh investasi yang sukses dalam budaya adalah Glasgow, yang memantapkan posisinya sebagai ibukota kebudayaan di Eropa dengan melakukan tradisi investasi budaya untuk segala hal mulai dari festival musik hingga membangun the Lighthouse, pusat desain dan arsitektur yang membuat kota itu sebagai simbol desain yang imajinatif, berstandar tinggi dan peduli pada kualitas hidup. Namun bagaimanapun investasi budaya tetap harus dilakukan dengan perhitungan yang matang dan sesuai dengan konteks lokal. Investasi sering gagal jika para perencananya berharap sepenuhnya pada fasilitas budaya berskala besar seperti teater atau museum yang sangat luas, dan pendapatan tidak mampu memenuhi biaya operasional. Di Frankfurt dan Berlin, para pemimpin lokal menghadapi kesulitan mempertahankan sejumlah institusi budaya yang menjamur baik karena subsidi pada masa sebelumnya maupun sebagai akibat reunifikasi Jerman.

Para pengambil keputusan yang ingin menghindari kesulitan finansial sebaiknya mempertimbangkan bentuk kebudayaan apa yang akan didukung dan mendapatkan sponsor dari sektor swasta atau masyarakat umum. Dengan kebijakan budaya yang dipersiapkan secara demokratis dan dirancang sesuai dengan aset, nilai dan tradisi lokal, maka para pelaksana pembangunan bisa menunjukkan kekuatan budaya yang luar biasa untuk merangsang dinamika dan kesejahteraan perkotaan. Maka, budaya mempunyai dampak ekonomis yang jelas dan terukur; tantangannya adalah menyeimbangkan investasi yang harmonis dengan tradisi kota, menghargai adat istiadat dan mengikat masyarakatnya.

#### Referensi:

Asian New Urbanism, William S.W. Lim, Select Books Pte. Ltd., 1998

The Power of Place, Urban Landscape as Public History, Dolores Hayden, The MIT Press, 1997.

Asiaweek, December 15, 2000.



